



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-39.KP.03.04 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS HUKUM AHLI MADYA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KP.10.02-65 tanggal 28 April 2022, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Madya melalui mekanisme penyesuaian/inpassing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Madya melalui Penyesuaian/Inpassing di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2021 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui Penyesuaian/Inpassing;
 - 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karir Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 1155 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI MADYA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
5. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
7. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
8. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara;
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama;
10. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Negara;
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
14. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-39.KP.03.04 TAHUN 2022
TANGGAL : 01 Juli 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	TARSAN SIMANIHURUK, S.H., M.Si. NIP. 196502041986031002	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara pada Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal	Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal	144
2.	SUMARSONO, S.H., M.Si. NIP. 197301091993031001	Pembina Tk.I (IV/b)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Analisis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	144
3.	ASWAN DERMAWAN IDRAK, S.H., M.H. NIP. 196501101990031003	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	144
4.	MHD TAVIP, S.H., M.Hum. NIP. 196411111986031003	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasayarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara	144
5.	EDISON MANIK, S.H., M.Si. NIP. 197802172001121002	Pembina Tk.I (IV/b)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau	54
6.	ARIANCE KOMILE, S.H., M.Si. NIP. 196508251998032001	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur	9
7.	YOHANIS TANI, S.H., M.H. NIP. 196605061986031002	Pembina (IV/a)	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	144

1	2	3	4	5	6
8.	MAEMUNA B, S.Sos., M.H. NIP. 196902011992032001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	144
9.	ERNA SULISTYOWATI, S.H., M.H. NIP. 196512161989032001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	144
10.	IDA NATA H DAMERIANA R SIHALOHO, S.H., M.H. NIP. 197301012001122001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara	144
11.	ARY WIDYA ANITASARI, S.H., M.H. NIP. 197201061994032001	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat	144
12.	Dra. DIENTJE ELENSIA BULE LOGO, M.Si. NIP. 196612211992032002	Pembina (IV/a)	Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur	144
13.	BUDI SRI HARYANTO, S.H., M.H. NIP. 196905112001121001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Analisis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	144
14.	DINA YENNY MARGARETHA SITEPU, S.H., M.Kn. NIP. 197801142003122001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara	114
15.	NURHAYATI, S.H., M.H. NIP. 196807132002122001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau	114

1	2	3	4	5	6
16.	LANANG DWI KURNIAWAN, S.H., M.H. NIP. 197709012008011001	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah II pada Balai Harta Peninggalan Jakarta	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta	84
17.	DIANA ESTER NOORTJE RETRAUBUN, S.Sos., S.H., M.Si. NIP. 196812192001122001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku	84
18.	AGUS PRIHANDOKO, S.H., M.Hum. NIP. 197312282003121001	Pembina (IV/a)	Kepala Urusan Umum pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	84
19.	RETNO KUSUMA DEWI, S.H., M.H. NIP. 198005042005012001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Analisis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	54
20.	WAHYU JATI PRAMANTO, S.H., M.H. NIP. 198206142005011001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	54
21.	SUSANTI YULIANDARI, S.E., M.H. NIP. 197903132006042001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	54
22.	INDRO HARTO GALUNG IDRIS, S.H., M.H. NIP. 197802162000031001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara	54
23.	NORIKA DIANA UMBARTY, S.H., M.H. NIP. 197211301992032001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Analisis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	54
24.	RINI MARYAM, S.H., M.Si. NIP. 197707112006042001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan	Analisis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan	9
25.	NORMA DORYANA, S.H., M.Si. NIP. 197811262005012001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Analisis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	9

1	2	3	4	5	6
26.	SITI CHODIJAH, S.H., M.Si. NIP. 197507311999032001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Analisis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	9
27.	BUDIMAN SANTOSO, S.H., M.Si. NIP. 196902191993031002	Pembina (IV/a)	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan	Analisis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan	9
28.	DWI SATRIA WIJANARKO, S.Kom., M.H. NIP. 198003122006041001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan	Analisis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan	9



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY